



## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru**

**Rizka Gusnia Ananda**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Jl. William Iskandar Ps. V. Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

E-mail: [rizka.gusnia8804@grad.unri.ac.id](mailto:rizka.gusnia8804@grad.unri.ac.id)

**Abstract :** This study aimd to measure the factors influencing the implementation of waste management policy in Pekanbaru City based on Edward III's theory, as well as to identify other factors beyond the fours dimensions of Edward III taht affect policy implementation. The research employed a mixed-methods approach with a sequential explanatory design. Quantitative data were collected from 100 respondent consisting of officials of the Environmental and Sanitation Agency (DLHK), the community, and the stakeholders realted to Regionel Regulation No. 8 of 2014 Pekanbaru City. Qualitative data were obtained through in-depth interviews with six key informants to strengthen the quantitave findings. Regression analysis indicates that communication contributes 9,4%, resources 12,6%, disposition 12,5%, and bureaucratic structure 30,2% to the implementation of waste management policy in Pekanbaru. Simultaneously, the four factors have a positive and significant influence with a total cuontribution of 64,7% while the remaining 35,3% is explained by other factors. The interview results further reveal that synergy among factors and the substance of the policy itself also play a role in influencing the implementation of waste management policy.

**Keywords:** Communication, resources, disposition, bureaucratic structure, policy implementation, waste managament in Pekanbaru

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru berdasarkan teori Edward III, dan mengidentifikasi faktor selain keempat faktor Edward III yang ikut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan desain *Sequential Explanatory*. Data kuantitatif diperoleh dan disebarluhan kepada 100 responden dari aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta masyarakat dan pihak terkait PERDA No 8 Tahun 2014 Kota Pekanbaru. Sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 6 informan kunci untuk memperkuat hasil kuantitatif. Analisis regresi menunjukkan bahwa faktor komunikasi berkontribusi sebesar 9,4%, sumber daya 12,6%, disposisi 12,5%, dan struktur birokrasi 30,2% terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru. Secara simultan keempat faktor berpengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi sebesar 64,7% sedangkan 35,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil wawancara menegaskan terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi kebijakan implementasi pengelolaan sampah yaitu sinergi antar faktor dan isi kebijakan terkait.

**Kata Kunci:** Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pekanbaru

### **1. PENDAHULUAN**

Permasahan sampah adalah isu lingkungan krusial dalam Tingkat global, terutama wilayah perkotaan. Pencemaran lingkungan, permasalahan kesehatan dan sosial, pengurangan kenyamanan masayarkat dapat terjadi apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Dalam lingkup Indonesia, pengelolaan sampah menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat maupun daerah, seiring dengan Upaya Pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat (Damanhuri & Padmi, 2016).

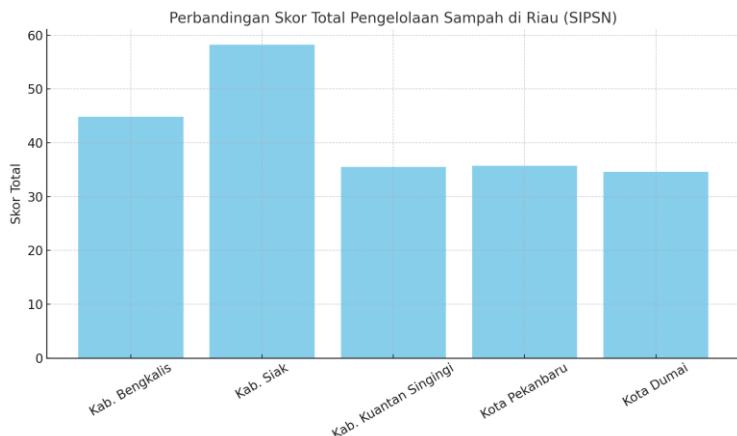
Pemerintah pusat telah mengatur pengelolaan sampah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang secara yuridis sudah menjadi regulasi utama dan dasar hukum dalam sistem pengelolaan nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang berstatus sebagai aturan pelaksana dari UU 81/2008. Peraturan ini memperjelas tanggung jawab teknis dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga, serta mendorong penerapan 3R.

Wilayah perkotaan menjadi salah satu wilayah yang banyak menghasilkan sampah. Dari perkembangan yang begitu cepat, pertumbuhan penduduk mencapai 1.167.599 jiwa (BPS Pekanbaru,2025) yang tersebar di 15 kecamatan dengan luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup> menjadikan Pekanbaru menjadi kota dengan produksi sampah mencapai ± 1.100 ton perhari. Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 sebagai landasan hukum kebijakan pengelolaan sampah dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. PERDA ini ditetapkan sebagai kebijakan daerah yang menjadi dasar operasional pengelolaan sampah di wilayah Pekanbaru dengan peraturan:

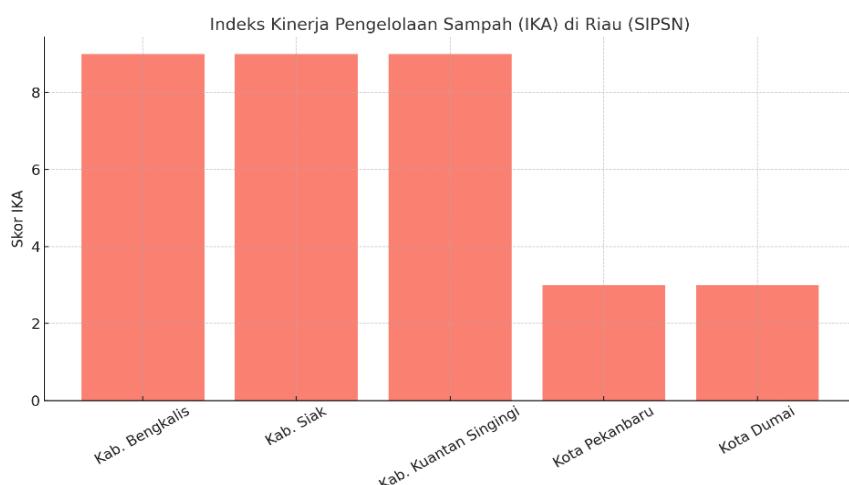
- Kewajiban Masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan sampah secara benar;
- Kewenangan DLHK Kota Pekanbaru dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah.
- Pelibatan pihak ketiga/swasta dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah berdasarkan sistem zona'
- Sanksi administrative dan pidana bagi pelanggar ketentuan.

Dengan demikian kebijakan ini tidak hanya normative, namun juga operasional mengikat seluruh pihak dalam sistem pengelolaan sampah, namun dalam implementasinya pelaksanaan PERDA ini menghadapi berbagai hambatan.

Berdasarkan data SIPSN tahun 2024, kota Pekanbaru memperoleh skor total 35,7 yang tergolong rendah dibandingkan Kabupaten lainnya. Meskipun Pekanbaru memiliki skor kebijakan tertinggi (11), yang menunjukkan regulasi cukup lengkap, namun aspek implementasi justru sangat lemah (skor 1) dan capaian target pengelolaan sampah hanya 2,7% terendah di Riau. Indicator efisiensi anggaran juga bernilai nol, mengindikasikan dana yang tersedia belum digunakan secara efektif. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya skor kota bersih (3/10) dan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKA=5). Berikut grafik dari SIPSN lebih lanjut:



Gambar 1 Grafik Data Skor Total Pengelolaan Sampah di Riau



Gambar 2 Grafik Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah di Riau

Gambar 1 menunjukkan bahwa skor total Kota Pekanbaru hanya 35,7, jauh tertinggal dibandingkan Kabupaten Siak (58,2) dan Bengkalis (44,8). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang lebih besar, kinerja pengelolaan sampahnya belum optimal.

Lebih lanjut, pada Gambar 2 terlihat bahwa Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKA) Kota Pekanbaru hanya bernilai 3, jauh di bawah Kabupaten Siak, Bengkalis, maupun Kuantan Singgingi yang masing-masing bernilai 9. Fakta ini menegaskan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan melalui Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dengan realisasi implementasinya di lapangan.

Fenomena rendahnya IKA ini dapat dijelaskan melalui dimensi komunikasi, terlihat dari efektivitas sosialisasi kebijakan yang belum menyeluruh, sumber daya, di mana sarana dan prasarana tersedia tetapi belum sebanding dengan timbulan sampah yang mencapai  $\pm 1.000$  ton per hari, disposisi, tercermin dari rendahnya capaian target pengelolaan sampah yang hanya 2,7%, serta lemahnya komitmen pelaksana dan Masyarakat, dan struktur birokrasi, yang

meskipun ditopang oleh regulasi lengkap (skor kebijakan tertinggi = 11), namun tidak diikuti implementasi yang efektif (skor implementasi = 1).

Fenomena di lapangan menunjukkan adanya masalah pada keempat faktor implementasi kebijakan menurut Edward III. Dari aspek komunikasi, lemahnya sosialisasi menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memahami kewajiban dalam Perda, terbukti dengan masih maraknya TPS ilegal dan ketidakpatuhan pada jam buang sampah. Dari aspek sumber daya, keterbatasan armada pengangkut dan kapasitas TPA yang hampir penuh menunjukkan ketidaksiapan sarana dalam mengimbangi volume sampah harian yang mencapai ±1.000 ton. Faktor disposisi juga menjadi kendala, di mana rendahnya kesadaran masyarakat serta inkonsistensi pelaksana lapangan membuat kebijakan sulit dijalankan. Sementara dari aspek struktur birokrasi, pembagian zonasi pengelolaan antara pihak swasta dan DLHK sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dengan menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta mengukur besaran pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing faktor melalui analisis jalur. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga dapat menjadi masukan bagi pengembangan strategi implementasi yang lebih efektif, khususnya dalam penyempurnaan implementasi Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix methods*) dengan strategi *Sequential Explanatoris*. Penelitian ini diawali dengan tahap kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan tahap kualitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Pada tahap kuantitatif, dilakukan survei terhadap 100 responden yang mewakili pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin menggunakan margin of error 10% dan Teknik proportional stratified random sampling. Populasi penelitian adalah penduduk kota pekanbaru berusia 18-59 tahun ( $\pm 772.000$  orang) yang dianggap relevan karena merupakan pihak yang terdampak langsung dan terlibat langsung dalam kebijakan pengelolaan sampah.

Tahap kualitatif dilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengetahui, menganalisis, mengidentifikasi faktor selain keempat faktor dalam Edward III yang mempengaruhi

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pekanbaru. Dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 6 informan kunci yang dipilih secara purposive. Informan terdiri atas pejabat pemerintah, petugas lapangan, tokoh Masyarakat, warga terdampak, serta pengelola bank sampah.

Penelitian ini dilaksanakan di Pekanbaru. Dalam penelitian ini sumber terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer melalui kusioner dan wawancara. Kusioner disusun berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III (komunikasi, sumber dyaya, disposisi, struktur birokrasi) menggunakan skala liker 1-7 dan hasil Wawancara bersifat yang semi terstruktur. data sekunder meliputi dokumen kebijakan, laporan statistic, catatan kinerja DLHK, serta publikasi akademik yang relevan. Teknik pelengkap berupa observasi dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dalam dua tahap. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan SPSS. Uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan linearitas) dilakukan untuk memastikan model memenuhi kriteria BLUE. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (parsial), uji F (simultan), serta koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk menilai daya jelaskan model. Data kualitatif dianalisis menggunakan kerangka Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas diperkuat dengan triangulasi dan member checking.

Integrasi kedua metode memberikan wawasan yang komprehensif: hasil kuantitatif mengukur pengaruh empat faktor Edward III terhadap implementasi kebijakan, sedangkan temuan kualitatif mengungkap faktor tambahan seperti isi kebijakan dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, desain penelitian ini tidak hanya menyajikan bukti statistik, tetapi juga penjelasan kontekstual yang memastikan kesimpulan lebih kuat dan bermakna mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dari penelitian ini dimulai dengan teknik analisis kuantitatif untuk mengukur pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen untuk mengetahui bahwa variabel yang digunakan valid dan reliabel, dan dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data memenuhi persyaratan analisis regresi linear berganda.

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Hasil dari uji asumsi klasik dapat dikategorikan menjadi 4 uji yaitu:

- Uji normalitas: hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yang berarti residual terdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas dan pengujian statistic dapat dinyatakan valid dan tentunya sangat bermanfaat untuk kelanjutan analisis penelitian ini.
- Uji Linearitas: uji ini mengonfirmasi bahwa hubungan antara masing-masing variable independent dalam hal ini keempat faktor Edward III dengan variable dependen bersifat linear, karena nilai signifikansi *deviation from linearity* berada di atas 0,05. Hal ini memastikan analisis regresi dapat diterapkan.
- Uji multikolinearitas: Dimana hasil uji menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variable independent berada di bawah 10, sedangkan nilai toleransi di atas 0,10. Hal ini menandakan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Artinya tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independent. Dengan kata lain masing-masing variabel independent dalam penelitian ini berdiri sendiri dan tidak saling mendominasi.
- Uji Heteroskedastisitas: hasil uji penelitian ini menggunakan uji gletser dimana nilai signifikansi yang ditunjukkan berada di atas 0,05 untuk semua variable. Hal ini berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Grafik scatterplot juga memperkuat hal ini karena tidak terlihat pola tertentu, sehingga model dapat dinyatakan reliabel. Berikut table hasil ujinya.

## 2. Uji T Parsial

Hasil uji T menunjukkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru (Y), dengan tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji T Parsial Variabel X terhadap Variabel Y

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Unstandardized Coefficients Std. Error			
1	(Constant)	1.679	2.994	.561	.576
	Komunikasi	.164	.069	.165	2.370 .020
	Sumber Daya	.222	.052	.295	4.241 .000
	Disposisi	.219	.073	.225	3.010 .003
	Struktur Birokrasi	.530	.092	.406	5.741 .000

a. Dependent Variable: Implementasi Kebijakan Perda No 8 Tahun 2014 Pekanbaru

Dengan nilai t hitung dan signifikansi komunikasi ( $t= 3,521$ ;  $p= 0,001$ ), sumber daya ( $t= 4,212$ ;  $p= 0,000$ ), disposisi ( $t= 2,975$ ;  $p= 0,004$ ), dan struktur birokrasi ( $t= 5,132$ ;  $p= 0,000$ ) menunjukkan bahwa keempat variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Struktur birokrasi menjadi faktor paling dominan, diikuti oleh sumber daya, disposisi, dan komunikasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan organisasi, sikap pelaksana, dan sistem komunikasi yang mendukung. Oleh karena itu perbaikan birokrasi dan penguatan kapasitas pelaksana menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah.

### **3. Uji F Simultan**

Hasil F hitung menunjukkan bahwa keempat variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pekanbaru, ditandai dengan tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji F Simultan

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1411.370	4	352.842	43.533
	Residual	769.990	95	8.105	
	Total	2181.360	99		

a. Dependent Variable: Implementasi Kebijakan Perda No 8 Tahun 2014 Pekanbaru

b. Predictors: (Constant), Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi

Berdasarkan hasil output ANOVA, diperoleh nilai F hitung 45,533 dalam hal ini  $>$  dari F tabel (2,47) dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Hal ini selaras dengan pendekatan multivariat dalam kebijakan publik, khususnya yang dijelaskan oleh model implementasi Edward III, yang menekankan pentingnya sinergi antara komunikasi yang efektif, struktur organisasi yang terkoordinasi, kecukupan sumber daya, dan disposisi (sikap) pelaksana dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

### **4. Analisis Regresi Berganda**

Berdasarkan nilai koefisien unstandardized, persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah:

$$Y = 1.679 + 0.164X_1 + 0.222X_2 + 0.219X_3 + 0.530X_4$$

Koefisien 0,164 pada variabel komunikasi ( $X_1$ ) berarti setiap peningkatan komunikasi sebesar satu satuan akan meningkatkan implementasi kebijakan sebesar 0,164, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien 0,222 pada variabel sumber daya ( $X_2$ ) menunjukkan bahwa setiap peningkatan sumber daya sebesar satu satuan akan meningkatkan implementasi kebijakan sebesar 0,222. Koefisien 0,219 pada variabel disposisi ( $X_3$ ) menandakan bahwa setiap peningkatan disposisi pelaksana sebesar satu satuan akan meningkatkan implementasi kebijakan sebesar 0,219. Koefisien 0,530 pada variabel struktur birokrasi ( $X_4$ ) adalah yang terbesar, menunjukkan bahwa struktur birokrasi merupakan variabel paling dominan. Artinya, setiap peningkatan struktur birokrasi sebesar satu satuan akan meningkatkan implementasi kebijakan sebesar 0,530. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh positif terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, dengan struktur birokrasi sebagai faktor yang paling dominan.

## 5. Koefesien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefesien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,647. Artinya, sebesar 64,7% variasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, yaitu komunikasi ( $X_1$ ), sumber daya ( $X_2$ ), disposisi ( $X_3$ ), dan struktur birokrasi ( $X_4$ ). Sementara itu, sisanya 35,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini.

Tabel 3 Hasil Koefesien Determinasi R Square

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.804 <sup>a</sup>	.647	.632	2.84696	

a. Predictors: (Constant), Struktur Birokrasi, Sumber Daya, Komunikasi,

Disposisi

b. Dependent Variable: Implementasi Kebijakan Perda No 8 Tahun

2014 Pekanbaru

Berdasarkan perhitungan proporsional dengan rumus berikut:

$$\text{Pengaruh variabel } X_i = \frac{\text{Koefesien } X_i}{\text{Total Koefesien}} \times R^2$$

dari koefisien regresi unstandardized, kontribusi masing-masing variabel terhadap implementasi kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Hasil Pengaruh Masing-Masing Variabel X terhadap Variabel Y

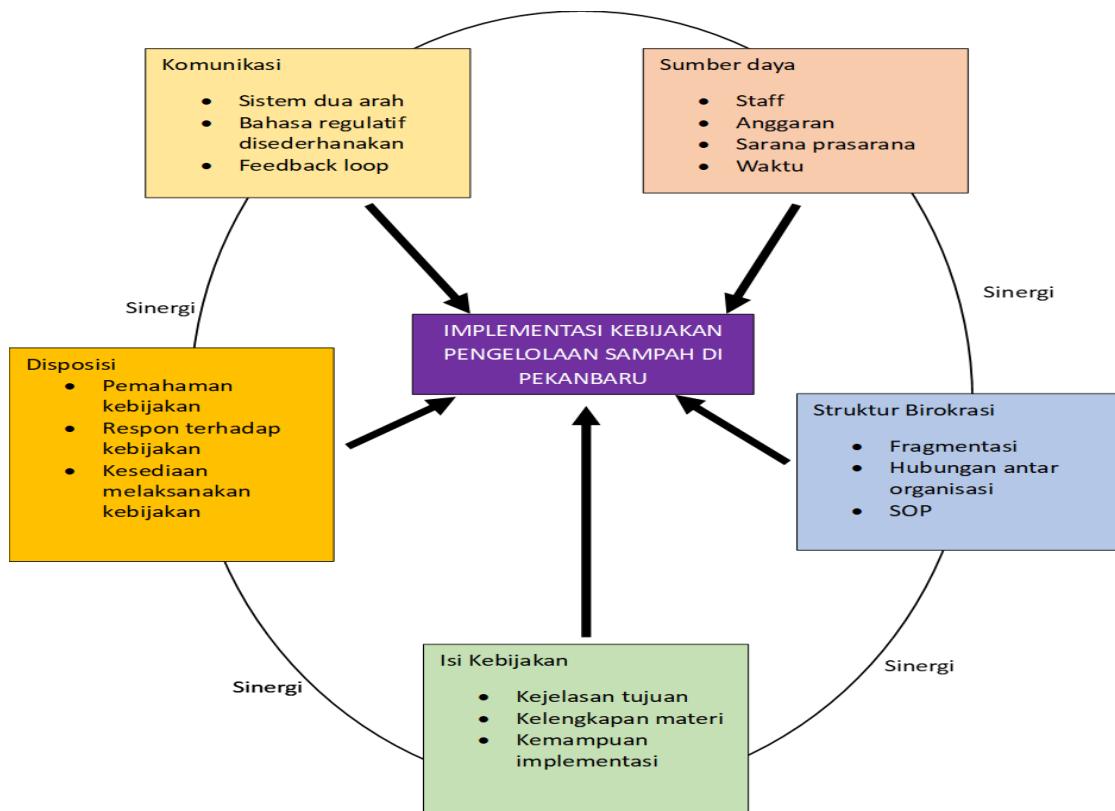
Variabel	Koefisien Regresi	Proporsi	Kontribusi (%)
Komunikasi ( $X_1$ )	0,164	0,145	9,4%
Sumber daya ( $X_2$ )	0,222	0,196	12,6%
Disposisi ( $X_3$ )	0,219	0,193	12,5%
Struktur birokrasi ( $X_4$ )	0,530	0,467	30,2%
<b>Total</b>	<b>1,135</b>	<b>1,00</b>	<b>64,7%</b>

## 6. Faktor Lain di Luar Faktor-Faktor Edward III

Hasil penelitian kualitatif mengungkapkan adanya faktor tambahan di luar model Edward III yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

- Isi Kebijakan. Kejelasan regulasi, target yang realistik, serta keberadaan insentif kepatuhan terbukti sangat menentukan efektivitas implementasi.
- Sinergi antar Faktor. Keempat faktor Edward III tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung. Misalnya, sumber daya yang cukup tidak efektif tanpa komunikasi kebijakan yang jelas.

Dari hasil temuan dan penelitian, penulis menemukan rekomendasi kerangka penelitian terkait faktor-faktor yang lebih relevan untuk digunakan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pekanbaru. Dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3 Rekomendasi Kerangka Penelitian

## **7. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pekanbaru secara signifikan dipengaruhi oleh empat faktor dalam model Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) dengan struktur birokrasi diidentifikasi sebagai faktor yang paling dominan.

Saluran komunikasi masih bersifat satu arah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara instruksi kebijakan dan pemahaman di tingkat pelaksana lapangan. Sumber daya yang mencakup personel, fasilitas, dan pendanaan tersedia, namun belum terdistribusi dan termanfaatkan secara optimal sehingga menurunkan efektivitas keseluruhan. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya dedikasi dan komitmen, tetapi upaya tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem insentif maupun pengembangan kapasitas yang memadai. Faktor paling krusial adalah struktur birokrasi yang hierarkis dengan kewenangan yang terfragmentasi, sehingga melemahkan koordinasi dan responsivitas, serta menimbulkan tumpang tindih fungsi dan inefisiensi.

Di luar kerangka Edward III, terdapat faktor lain yang turut membentuk implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya integrasi sinergi antar faktor, substansi kebijakan, serta alokasi waktu yang cukup ke dalam kerangka tata kelola pengelolaan sampah. Keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Pekanbaru tidak hanya bergantung pada penguatan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi juga pada penyelesaian elemen kontekstual seperti desain kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan sinergi kelembagaan. Sintesis ini menegaskan perlunya reformasi yang menggabungkan kejelasan regulasi, efisiensi sumber daya, komunikasi partisipatif, serta koordinasi yang integratif guna mencapai implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan

Untuk memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pekanbaru, beberapa Saran yang dapat diajukan adalah:

1. Komunikasi perlu lebih partisipatif dan bersifat dua arah, didukung dengan pelatihan teknis serta sosialisasi kebijakan baik kepada pelaksana maupun masyarakat.
2. Sumber daya perlu dioptimalkan, tidak hanya melalui peningkatan anggaran, tetapi juga distribusi yang efisien, penyediaan fasilitas yang memadai, serta keselarasan dengan ketentuan regulasi.
3. Kapasitas pelaksana harus ditingkatkan melalui pelatihan rutin, pemberian insentif, dan pengakuan atas kontribusi mereka sebagai aktor garis depan.
4. Reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mengurangi fragmentasi kewenangan dan meningkatkan koordinasi antarunit pelaksana.

5. Partisipasi masyarakat harus diperkuat melalui pendidikan berkelanjutan serta integrasi isu pengelolaan sampah ke dalam sekolah dan program lokal berbasis komunitas.
6. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi peran politik, keterlibatan sektor swasta, serta inovasi digital dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, L. (2020). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, A. (2011). Implementasi Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 115–124.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2016). Pengelolaan sampah. Bandung: ITB Press.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the third world. Princeton: Princeton University Press.
- Purba, R. (2006). Kebijakan pembiayaan pengelolaan sampah di daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 45–56.
- Sudrajat, A. (2006). Pembiayaan pengelolaan sampah daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 87–101.
- Sulistiyorini, D., Prasetyo, Y., & Wibowo, A. (2015). Pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(3), 215–230.
- Sufi, W., & Herlinda, D. (2017). Penerapan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian berbasis online di BKD Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 9(2), 102–108. <https://doi.org/10.31849/nia.v9i2.2103>
- Tambunan, R. (2020). Model implementasi kebijakan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 33–49.
- Utami, S. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan lingkungan perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 144–159.
- Winzila, D. (2024). Data jumlah TPA Kota Pekanbaru. Laporan DLHK Pekanbaru. Pekanbaru: Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Yulianti, R., & Ramadhan, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(1), 55–68.
- Zulkarnaini, & Mariana, Z. (2020). *Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 123–135.